



**RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO PEREKONOMIAN SERETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera selatan

“Sumatera Selatan Terus Maju Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026. Penyusunan rencana kerja dilakukan secara sistematis, terukur dan akuntabel dengan mengacu kepada prioritas pembangunan daerah.

Melalui dokumen ini, Biro Perekonomian berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat kapasitas aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah, memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, serta mendorong kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penyusunan dokumen.

Semoga laporan rencana kerja ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya	11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

3.1 Tujuan dan Sasaran.....	16
-----------------------------	----

BAB V PENUTUP.....	22
---------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Susunan kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan..... 11
Tabel 2.2	Susunan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin..... 12
Tabel 2.3	Susunan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan..... 12
Tabel 2.4	Susunan kepegawaian berdasarkan Agama..... 13
Tabel 2.5	Susunan kepegawaian berdasarkan Jabatan 13
Tabel 2.6	Susunan kepegawaian berdasarkan status kepegawaian..... 14
Tabel 2.7	Jumlah Aset Biro Perekonomian..... 14
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 17

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), profesional, transparan dan akuntabel diperlukan perencanaan yang sistematis dan terukur sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Salah satu instrumen penting dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat arah kebijakan, prioritas Pembangunan, serta program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur staf yang bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian, memiliki peran strategis dalam memastikan tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan layanan bantuan hukum serta meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2026 ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian, serta berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan, dan arah kebijakan nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dokumen Renja ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus sebagai dasar alokasi anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja Biro Perekonomian. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai acuan utama pembangunan daerah dalam jangka menengah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai pedoman operasional pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, khususnya pada bagian program dan kegiatan Biro Perekonomian;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan utama dalam penyelarasan tujuan dan sasaran Renstra Biro Biro Perekonomian;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan fungsi strategis Biro Perekonomian dalam mendukung pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah.

Dengan memperhatikan dasar hukum tersebut serta kebutuhan akan perencanaan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, Renja Biro Perekonomian ini disusun sebagai landasan arah kebijakan dan strategi biro dalam kurun waktu satu tahun, yang berkualitas, profesional, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan

yang menjadi acuan operasional dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Biro Perekonomian. Renja ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan arah strategis organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Biro Perekonomian Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan arah kebijakan strategis dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang dapat diukur dan dilaksanakan secara efektif oleh Biro Perekonomian;
2. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan hasil yang terukur;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian;
4. Mewujudkan sinergi dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek;
5. Menjadi pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja tahunan serta dasar penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Perekonomian merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi, logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah.

Sebagai bagian integral dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan fungsi dan tugas Biro Perekonomian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan secara teknis uraian tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi, logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan administrasi daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi, logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi, logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas kediansan lainnya diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Visi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah ***“Terwujudnya Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasis pengetahuan dan inovasi, dengan budaya Nusantara.”***.

Terwujudnya visi di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dilaksanakan oleh segenap personil Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan di bidang perekonomian, industri, dan jasa, serta produksi daerah dan sumber daya alam.
2. Memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian di Sumatera Selatan.
3. Melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian untuk memastikan kesesuaian dengan rencana strategis daerah.

Tugas pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan, menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi, logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun tugas dan fungsi Biro Perekonomian sebagaimana tersebut di atas didukung dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Produksi

Bagian produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan usaha peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kelautan serta pengembangan pembangunan industri dan perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil, energi dan sumber daya mineral.

2. Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan.

3. Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi

Bagian sarana perekonomian dan pengembangan teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang transportasi, logistik, pariwisata, lembaga ekonomi serta penanaman modal dan bahan usaha milik daerah (BUMD) .

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Biro Perekonomian terdiri dari :

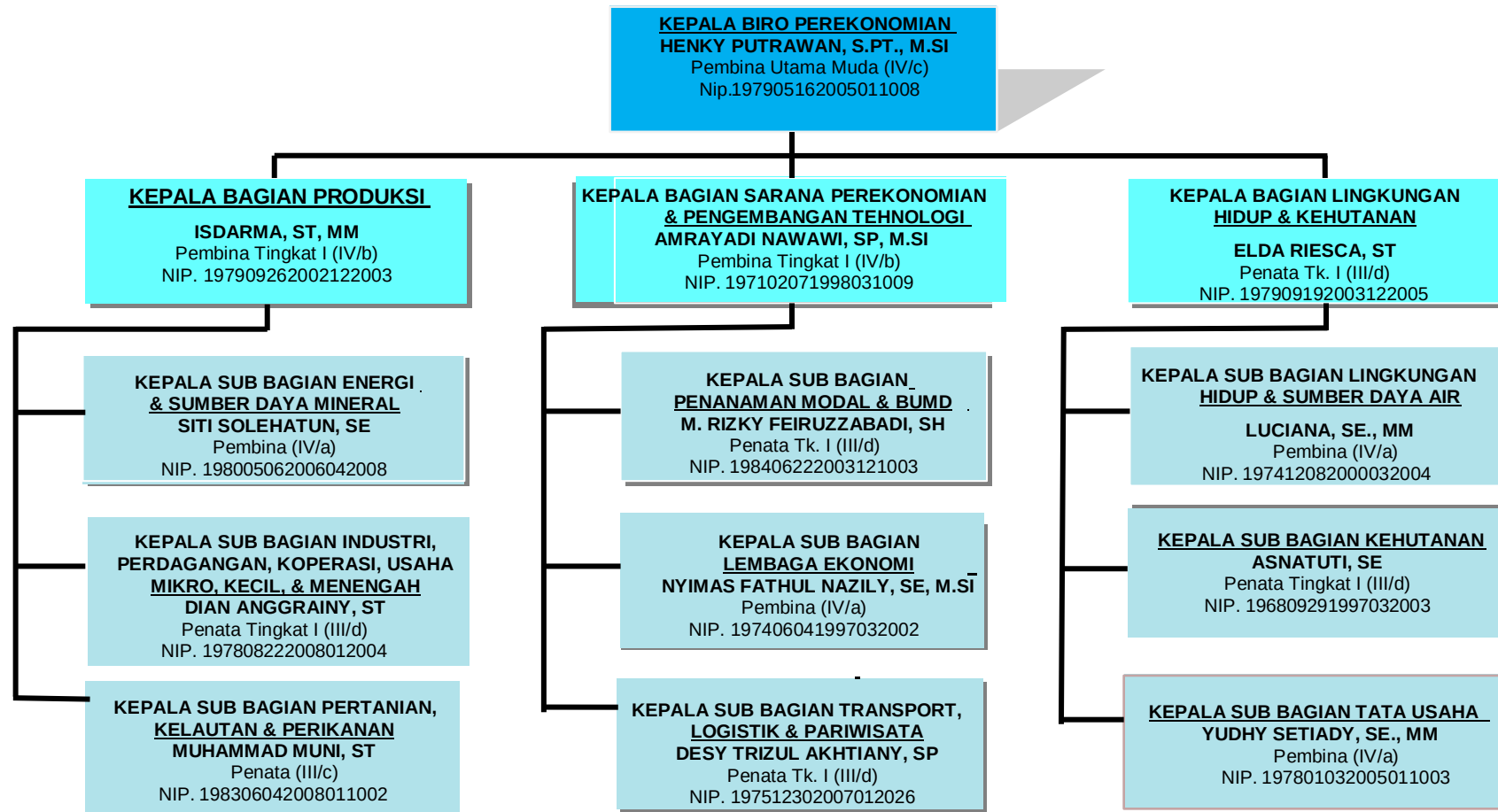
- a. Bagian Produksi , membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 2. Subbagian Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 3. Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air;
 2. Subbagian Kehutanan; dan
 3. Subbagian Tata Usaha.

c. Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Transportasi, Logistik dan Pariwisata;
2. Subbagian Lembaga Ekonomi; dan
3. Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah.

Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan ruang

Jumlah pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Tingkat Jenis Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	08 Orang
2.	Golongan III	18 Orang
3.	Golongan II	0 Orang
4.	Kelas Jabatan 9	03 Orang
5.	Kelas Jabatan 7	02 Orang
6.	Kelas Jabatan 5	0 Orang
Jumlah		31 Orang

b. Susunan Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	13 Orang
2.	Perempuan	25 Orang
Jumlah		38 Orang

c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	11 Orang
2.	Strata 1	19 Orang
3.	Dipeloma III	04 Orang
4.	SLTA	04 Orang
Jumlah		38 Orang

d. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan agama, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	38 Orang
2.	Kristen	00 Orang
Jumlah		38 Orang

e. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan jabatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II	01 Orang
2.	Eselon III	03 Orang
3.	Eselon IV	09 Orang
4.	Fungsional	00 Orang
Jumlah		13 Orang

f. Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan Status Kepegawaian, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	PNS	26 Orang
2.	PPPK	5 Orang
3.	Honorer Database BKN	0 Orang
4.	Honorer Yang Tidak Masuk Database	07 Orang
5.	TKPD	0 Orang
6.	Outsourcing	0 Orang
Jumlah		38 Orang

g. Sarana dan Prasarana

Adapun aset yang ada pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per bulan Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Aset Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Aset	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	4 unit
2	Kendaraan Roda 2	4 unit
3	Komputer	36 unit
4	Printer	17 unit
5	AC	12 Unit
6	Kulkas	4 unit

7	TV	6 unit
8	Meja Rapat	1 unit
9	Brankas	1 unit
10	Kursi Sofa Putih Tamu	1 Set
11	Dispenser	5 unit
12	Mesin Tik Manual	1 unit
13	Whiteboard	1 Unit

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
2. Memperkuat pelayanan administratif serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3.2. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah :

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
A.	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	831.240.144		
I	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.886.000		
1	4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169.886.000	1 Dokumen	100%
II	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	297.793.000		
2	4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.000.000	1 Paket	100%
3	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.793.000	1 Paket	100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
III	4.01.01.1.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.561.144		
4	4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	188.561.144	1 Laporan	100%
IV	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000		
5	4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75,000,000	1 Laporan	100%
V	4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah	100.000.000		
6	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	100.000.000		100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
B	4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana	2.628.421.475		
VI	4.01.06.01.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia	820.481.900		
7	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	489.313.500	2 Dokumen	100%
8	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	331.168.400	2 Dokumen	100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
VII	4.01.06.01.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik	907.069.575		
15	4.01.06.01.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	229,786,000	2 Dokumen	100%
16	4.01.06.01.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	318,779,125	1 Dokumen	100%
17	4.01.06.01.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	358,504,450	1 Dokumen	100%
VIII	4.01.06.01.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	900.870.000		

	4.01.06.01.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	128.068.350	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	103.412.500	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD	493.770.500	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	101.694.650	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD	73.924.000	1 Dokumen	100%
Jumlah.....				3.459.661.619		

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah.

Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang berguna dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara optimal, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI SUMSEL,**

HENKY PUTRAWAN,S.PT.,M.Si., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 197905162005011008